Revisi UU Minerba Dianggap Dorong Investasi

NERACA

Jakarta - Pengamat energi dan Pertambangan Eva A Djauhari berharap revisi UU mineral dan batu bara (minerba) dapat mendorong pertumbuhan investasi, konsisten serta dapat diterapkan dalam jangka panjang. "Kita harap betul bisa mendorong investasi dan dalam jangka panjang secara konsisten dapat diterapkan," ujar Eva dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (9/5).

Eva mengatakan, revisi tersebut mesti mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. "Jadi, UU Minerba harus bisa mengakomodir seluruh pemangku kepentingan termasuk industri (pelaku usaha), bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu revisi ini tidak boleh hanya difokuskan kepada isu-isu tertentu saja yang rentan dijadikan komoditas politik," lanjutnya.

Oleh karena itu, Eva meminta agar pembahasan revisi UU Minerba yang tengah berlangsung di Komisi terkait di DPR dilakukan dengan lebih komprehensif, terbuka dan mempertimbangkan aspek jangka panjang. "Dalam jangka panjang, RUU ini harus mempertimbangkan perkembangan-perkembangan di masa depan. Di akomodir sejak saat ini di pasal-pasal sehingga memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dan menunjang iklim investasi jangka panjang," jelas Eva.

Sementara itu, Komisi VII DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) bisa rampung pada pertengahan tahun ini. Saat ini, draft revisi UU Minerba masih digodok oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha mengatakan proses RUU Minerba diperkirakan akan lebih cepat rampung sebab pihaknya tengah melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Baleg.

Harapannya, proses ini tidak lagi menemui hambatan. Ia memperkirakan, pembahasan UU ini akan lebih cepat dari pembahasan revisi UU Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pembahasan UU Migas lebih lambat karena masih perlu menyamakan pemahaman antara Komisi VI dan Komisi VII. Dia menjelaskan draft revisi UU Minerba yang sedang dibahas menekankan soal aturan hilirisasi pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu terdapat bab khusus yang membahas insentif bagi pelaku usaha tambang, yang dinilai penting agar pelaku usaha bersemangat dalam berinvestasi.

Dengan adanya revisi UU Minerba ini, Satya menilai tidak akan membuat hilirisasi diberi relaksasi agar pertumbuhan industri hilir semakin baik. Sehingga Kementerian Perindustrian akan lebih mudah mengawasi dan menjalankan program hilirisasi. ● bari

DJP Siapkan Aplikasi e-Faktur Terbaru

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan aplikasi e-Faktur terbaru yaitu versi 2.1 untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi para pengusaha kena pajak. "Penyempurnaan aplikasi e-Faktur ini memperbaiki beberapa kekurangan pada versi sebelumnya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (9/5).

Adapun kekurangan pada aplikasi e-Faktur versi sebelumnya antara lain gagal impor data faktur yang berasal dari cabang pada aplikasi pusat, tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-Faktur (Non Etax), pajak masukan yang terekam ganda pada saat melakukan penggantian, dan berhasil pada saat upload Faktur sehingga menyebabkan data di SPT ganda, gagal cetak faktur pajak melalui aplikasi client dan Heap Memory Space pada saat membuat file SPT karena data yang besar.

Sementara itu, fitur tambahan pada e-Faktur versi 2.1 ini termasuk field baru untuk memasukkan nomor identitas (NIK atau nomor paspor) dalam hal lawan transaksi tidak memiliki NPWP, serta penambahan fungsi ekspor data Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran dan Retur Dokumen Lain Pajak Masukan.

Fitur baru yang lain adalah penambahan validasi wajib pilih Restitusi atau Kompensasi pada saat pembuatan SPT PPN yang statusnya Lebih Bayar, serta fitur watermark "BATAL" atau "DIGANTI" pada saat download file PDF faktur yang telah dibatalkan atau diganti. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penting untuk diketahui bahwa akan dilakukan down-time pada aplikasi e-Nofa dan e-Faktur yang akan dimulai pada Senin 14 Mei 2018 jam 17.00 WIB sampai dengan Selasa 15 Mei 2018 jam 07.00 WIB.

Selama masa down-time tersebut Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengakses aplikasi tersebut, terutama untuk pelayanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online dan permintaan persetujuan (upload) e-Faktur. Aplikasi e-Faktur Desktop tetap dapat digunakan untuk membuat SPT Masa PPN 1111.

Untuk memperbarui aplikasi e-Faktur ke versi 2.1, pengguna aplikasi diimbau untuk melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan) guna mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database e-Faktur)dan menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai proses instalasi dan update aplikasi e-Faktur dapat menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Aplikasi e-Faktur versi 2.1 sendiri dapat diunduh mulai Rabu ini di alamat https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi. ● bari

NERACA/Widi Suparwedi

PERTUMBUHAN KINERJA SEQUIS LIFE : kiri ke kanan. Director & Chief Agency Officer Sequis Edisjah bersama Director & Chief Financial Officer Lilyan Hidayat, President Director & CEO Tatang Widjaja, Head of Business Excellence & Project Management Office Dion P. Guntoro saat peluncuran PolisQ yakni aplikasi berbasis android dan IOS di Jakarta, Selasa (8/5). PT Asuransi Jiwa Sequis Life mencatat kinerja keuangan tahun 2017 yang positif dengan pendapatan premi netto Rp 3,01 triliun, naik 4 persen dibanding tahun 2016.

IDF 2018 Ajak Masyarakat Atasi Ketimpangan Wilayah

Jakarta - Ketimpangan antarwilayah masih merupakan pekerjaan rumah yang butuh perhatian. Indikasi tersebut setidaknya tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di kawasan bagian barat Indonesia. Karena itulah, sesuai agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo mengedepankan pembangunan Indonesia dari timur.

■ NERACA

Strategi ini mencakup investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa, serta upaya untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan yang signifikan dan terdistribusi secara lebih merata, terutama untuk kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam.

"Sekitar 80 persen kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Kawasan Barat Indonesia, khususnya pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, Kawasan Timur Indonesia masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, seperti dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Sebagai upaya konkret mengatasi disparitas regional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengundang masyarakat luas, baik mahasiswa, peneliti, akademisi, pakar pembangunan, pengambil kebijakan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil untuk ikut serta dalam ajang Call for Papers untuk Indonesia Development Forum (IDF) 2018.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan call for papers diharapkan berisi masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan wilayah. Secara lebih rinci, tambah Rudy, pengajuan makalah call for papers, dibuka mulai tanggal 22 Maret 2018 dan ditutup tanggal 19 Mei 2018 (23:59 WIB).

Sedangkan pemberitahuan hasil seleksi akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018, dan pengajuan makalah lengkap dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018. Makalah yang terpilih akan dipresentasikan pada Forum IDF 2018 tanggal 10-11 Juli 2018 serta akan dipublikasikan dalam jurnal yang terdaftar di ISBN/ISSN.

Semua makalah yang dipresentasikan di IDF 2018 juga akan dipublikasikan dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia. ● bari

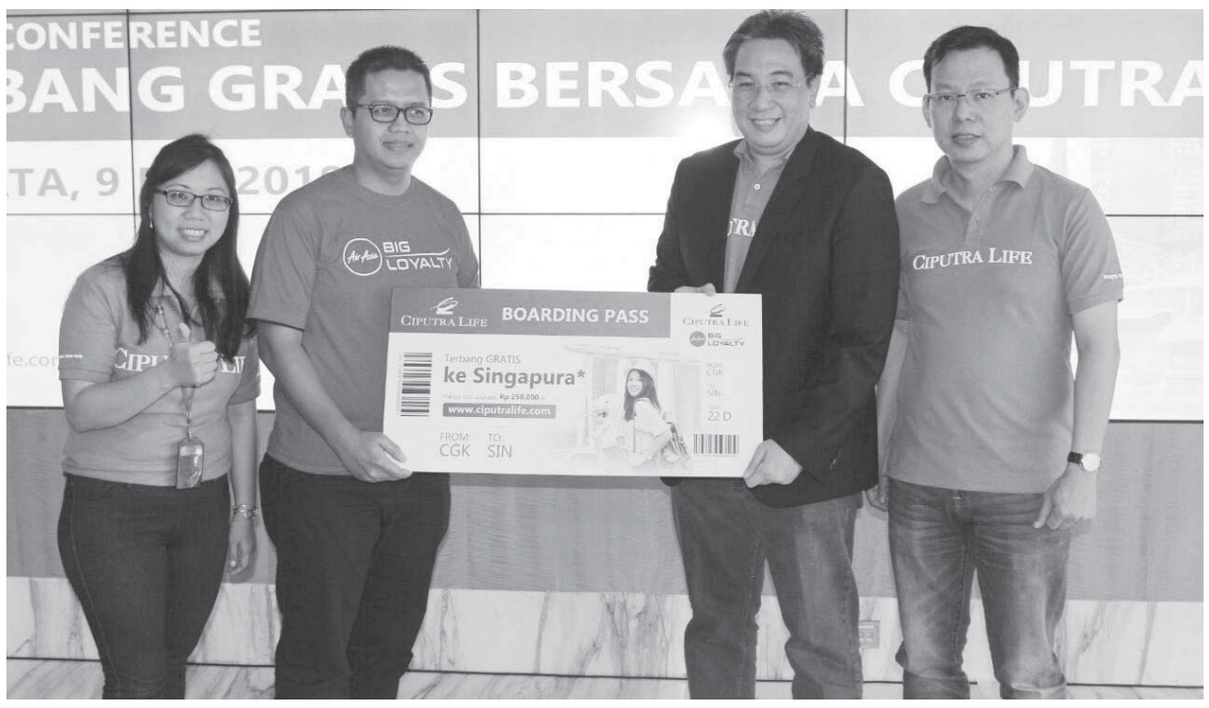

NERACA/Widi Suparwedi

TERBANG GRATIS NASABAH CIPUTRA LIFE : kiri ke kanan. Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto, Country Head AirAsia BIG Indonesia Arifin Prasetyo, Presiden Direktur Ciputra Life Hengky Djojosantoso dan Direktur Ciputra Life Then Henry Marten saat peluncuran Program Terbang GRATIS ke Singapura, bagi nasabah yang melakukan pembelian asuransi secara online melalui www.ciputralife.com senilai minimum premi Rp 250.000, di Jakarta, Rabu (9/5).

PPK Kemayoran Nyatakan Wisma Atlet Kemayoran Siap Digunakan

NERACA

Jakarta - Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran menyatakan telah rampung dalam pembangunan wisma atlet yang disiapkan untuk para atlet Asian Games dan Asian Paragames. Dengan rampungnya proyek pembangunan wisma atlet tersebut, PPKK akan menyerahkan pengelolaan wisma atlet tersebut kepada panitia Asian Games atau Inasgoc.

Kepala Divisi Pemasaran dan Humas PPKK Yoseph Indrajaya saat ditemui disalah satu wisma atlet tersebut menyampaikan bahwa saat ini wisma atlet telah siap digunakan untuk para atlet internasional. "Sebenarnya wisma atlet telah selesai Desember 2017, akan tetapi ada penambahan fasilitas karena juga digunakan untuk atlet paragames," jelas Yoseph di Jakarta, Rabu (9/5).

PPKK juga memberikan kesempatan kepada pada jurnalis dan para pegiat sosial media untuk dapat melihat langsung fasilitas yang ada di wisma atlet. Dalam satu ruangan, terdapat dua kamar tidur yang bisa menampung tiga atlet. Ruangan itu juga dilengkapi sofa, pendingin ruangan dua buah, toilet dan dapur, sementara kamar mandi juga dilengkapi dengan air panas, sehingga dijamin para atlet akan nyaman menempatinya.

Tim dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg), pekan lalu juga melakukan kunjungan ke Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. "Kami punya kewajiban untuk menyukseskan Asian Games, karena dua lokasi GBK dan Kemayoran merupakan kawasan yang berada di bawah Setneg. Kami berterima kasih kepada influencer, blogger, dan Bako Humas, dan juga para wartawan, yang bersama-sama kami untuk terus mensosialisasikan Asian Games," ujar Asisten Deputi Humas Kemensesneg, Masrokhan.

Tur Wisma Atlet ini diselenggarakan oleh PPK Kemayoran untuk memberi kesempatan kepada masyarakat melihat dari dekat persiapan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Asian Games bulan Agustus mendatang. "Masih ada waktu 3 bulan, namun waktu itu dirasakan datang dengan cepat. Karena itu segala persiapan harus dilakukan lebih cepat lagi. Kami mengajak masyarakat untuk melihat langsung, karena mulai tanggal 15 Mei area Wisma Atlet akan steril, sehingga hanya pihak berkepentingan saja yang diperbolehkan masuk," ujar Direktur Utama PPK Kemayoran Dwi Nugroho.

Melalui adanya tur ini, Dwi Nugroho berharap dukungan dan kteterlibatan masyarakat lebih luas agar penyelenggaraan Asian Games yang nantinya akan berlangsung di Jakarta dan Palembang, 18 Agustus-2 September 2018, berjalan dengan sukses. "Kami ingin persiapannya berlangsung lancar, dan juga sukses dalam pelaksanaan Asian Games nantinya, serta sukses prestasinya. Sukses itu berdampak kepada kepercayaan dunia terhadap Indonesia yang akan semakin meningkat, termasuk dalam sukses investasi nantinya," tambahnya. ● bari

Perusahaan Mulai Pertimbangkan Pembiayaan Ramah Lingkungan

NERACA

Jakarta - Kementerian BUMN mengharapkan perusahaan mulai mempertimbangkan skema pembiayaan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan agar bisa tumbuh berkelanjutan. "Perusahaan bakal 'sustain' kalau dia mempertimbangkan isu 'green financing'. Dan itu sudah disampaikan pemerintah," ujar Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro di Jakarta, Rabu (9/5).

Ia mengatakan bahwa melalui skema "green financing", salah satunya dengan menerbitkan obligasi hijau (green bond) maka perusahaan dapat menyasar pasar baru, yakni investor yang mempunyai ketertarikan pada isu perubahan iklim (climate changes). "Dengan perusahaan menerbitkan 'green bond', diharapkan ada sumber pendanaan baru dari investor-investor yang peduli dengan lingkungan," katanya.

Maka itu, lanjut dia, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mendorong BUMN menerbitkan obligasi hijau (green bond) sebagai alternatif pendanaan, terutama untuk proyek infrastruktur. Saat ini, baru dua perusahaan Indonesia yang menyatakan minatnya untuk menerbitkan green bond.

Menurut dia, BUMN sektor pengembang pelabuhan dan bandar udara (Bandara) berpeluang untuk menerbitkan "green bond" dalam rangka meggalang dana. Selain itu, proyek energi baru terbarukan (EBT) BUMN juga berpotensi menerbitkan green bond. ● bari

PENGUMUMAN

- Dengan ini diumumkan kepada para pihak yang berkepentingan terhadap perseroan terbatas **P.T. DWITAMA MITRABUANA ("Perseroan")** berkedudukan di Jakarta, adanya / telah dibuatkannya Ringkasan Rancangan pembubaran dan/atau likwidasi Perseroan.
- Bagi pihak yang berkepentingan maupun yang berkeberatan dapat menghubungi Direksi Perseroan di Kantor Perseroan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini.
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 11 Mei 2018

DIREKSI PERSEROAN
P.T. DWITAMA MITRABUANA

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. DUTA INDAH ICONIC** yang dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT.DUTA INDAH ICONIC tanggal 25 April 2018 Nomor 12 yang dibuat dihadapan INDRI JUNITA ASIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, ("**Perseroan**") dan pengangkatan Tuan KA TJIN selaku Likuidator Perseroan ("**Likuidator**").

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur-kreditur dapat mengajukan tagihan atau keberatan secara tertulis dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada likuidator dengan alamat : DUTA INDAH ICONIC Jalan M.H. Thamrin No.KM. 2, Panunggangan Utara, Pinang, Tangerang, Banten 15143, dengan lewatnya waktu tersebut keberatan tidak akan yang dilayani.

Tangerang, 11 Mei 2018
Direksi

BNC SEKURITAS INDONESIA

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BNC SEKURITAS INDONESIA

Direksi PT BNC Sekuritas Indonesia ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada:

Hari/tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Waktu : RUPST : 10:00-11:00 WIB
RUPSLB : 12:00-13:00 WIB
(akan dimulai segera setelah RUPST ditutup)
Tempat : PT BNC Sekuritas Indonesia
Wisma KEIA lt. 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi atas hasil kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017.
2. Penetapan pembagian Dividen Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Lain-lain.

RUPSLB
1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST dan RUPSLB berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB.

Jakarta, 11 Mei 2018
Direksi
PT BNC SEKURITAS INDONESIA

SEKAR GROUP

PT. SEKAR LAUT, Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") selanjutnya disebut "**Rapat**" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Pukul : 10.00 BBWI - Selesai
Tempat : Ruang Nirwana
Hotel Shangri-la
Jl. Mayjend. Sungkono No. 120, Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017 dan penetapan pembagian Dividen Tunai kepada para pemegang sahamnya;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut.

CATATAN
1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah :
   a. Hanya pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 9 Mei 2018, pukul 16.00 WIB.
   b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening yang sah namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 16:00 WIB.
2. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk Menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui perusahaan Efek Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat ini dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan membawa surat kuasa yang sah dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat dan dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dikantor Perseroan. Jl. Raya Darmo no. 23-25, Surabaya. Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat dilangsungkan, dengan disertai fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya dan Pemegang Saham serta kuasanya yang dalam hal Pemegang Saham adalah Perorangan, ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili Pemegang Saham Badan Hukum dalam hal Pemegang Saham adalah Badan Hukum.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ke Ruang Rapat. fotocopy Surat Kolektif Saham (SKS)/ Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya dan Kuasanya.

Surabaya, 11 Mei 2018
Direksi Perseroan

PT. Tunas Alfin Tbk.

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada :**

Hari/tanggal : Senin, 4 Juni 2018
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Jl.K.H.Agus Salim No.9
Tangerang

Adapun acara Rapat yang rencananya akan diagendakan adalah :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk penyisihan dana cadangan dan Pembagian Dividen Tunai serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian Dividen tunai tersebut;
4. Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018;

Catatan :
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi,Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa adalah ;
   a. Untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 16.00 WIB; dan
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 9 Mei 2018;
   c. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) / konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat;
   d. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 02 Juni 2018.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang saham atau Kuasanya diharapkan hadir diruang Rapat pada Pukul 12.30 WIB.

Tangerang, 11 Mei 2018
Direksi